

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian dan analisis tentang efektivitas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kediri telah menghasilkan kesimpulan. Yaitu sebagai berikut :

##### **1. Pemungutan BPHTB**

- a. Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) oleh Pemerintah Pusat

Dari hasil penelitian dan analisis, proses pemungutan BPHTB pada Pemerintah Pusat masih kurang Efektiv. Hal ini terjadi dikarenakan pada Pemerintah Pusat menerapkan sistem bagi hasil dengan Pemerintah Daerah.

- b. Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) oleh Pemerintah Daerah

Dari hasil penelitian dan analisi, proses pemungutan BPHTB pada Pemerintah Daerah lebih Efektiv. Karena tidak ada campur tangan dari Pemerintah Pusat.

## 2. Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Efektivitas pemungutan BPHTB dalam rangka meningkatkan PAD Kabupaten Kediri dimaksudkan untuk mengetahui perbandingan antara di pemerintah pusat dengan daerah. Sebab BPHTB sudah sepenuhnya menjadi hak pemerintah daerah sebagai pajak daerah. BPHTB merupakan sumber pendapatan baru di pemerintah daerah khususnya di Pemerintahan Kabupaten Kediri. Dan BPHTB sangat berpotensi besar terhadap PAD Kabupaten Kediri.

### a. Waktu dan Biaya Selama Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Dari hasil penelitian dan analisis data, waktu dan biaya pemungutan BPHTB telah terlaksana secara efektif.

### b. Sistem Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Dari hasil penelitian dan analisis data, sistem pemungutan BPHTB belum efektif. Hal ini terjadi karena diterapkannya sistem *Self Assessment*. Yang masih dianggap menyulitkan bagi sebagian wajib pajak yang hendak melakukan transaksi pembayaran kepada Dinas terkait.

### c. Aktor yang Berperan dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Dari hasil penelitian dan analisis data, aktor dalam pemungutan BPHTB melaksanakan tugasnya dengan baik dan efektif.

### d. Monitoring dan Pengawasan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Dari hasil penelitian dan analisis data, monitoring pemungutan BPHTB sudah efektif. Sedangkan untuk pengawasan dalam pemungutan BPHTB masih belum efektif, karena masih banyak kecurang-kecurangan dari wajib pajak BPHTB.

e. Hasil pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Dari hasil penelitian dan analisis data, hasil dari pemungutan BPHTB sangat efektif. Hal ini dibuktikan dari hasil realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melebihi target.

f. Kontribusi Pajak BPHTB Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri

Kontribusi pajak BPHTB terhadap PAD Kabupaten Kediri hasilnya efektif. Hal ini dapat dilihat dari hasil prosentase kontribusi pajak BPHTB terhadap PAD melebihi 75%.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Setelah Menjadi Pajak Daerah

a. Faktor Pendukung Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Setelah Menjadi Pajak Daerah

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No.1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah  
Perda Kabupaten Kediri, merupakan landasan hukum dan kekuatan hukum Kabupaten Kediri melalui Dinas Pendapatan untuk melaksanakan pemungutan pajak BPHTB.

## 2. Pengawasan yang Efektif

Pengawasan yang efektif disini harus dilaksanakan mulai dari sejak awal. Yakni mulai pada saat tahap perencanaan, tahap pelaksanaan hingga tahap pelaporan.

## 3. Peran Serta Wajib Pajak

Peran Serta Wajib Pajak merupakan salah satu kontributor utama untuk membantu Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri dalam melaksanakan pemungutan pajak BPHTB

### b. Faktor Penghambat Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Setelah Menjadi Pajak Daerah

#### 1. Kurangnya Kesadaran Sebagian Dari Wajib Pajak dalam Membayar Pajak BPHTB

Kurang adanya kesadaran dari sebagian wajib pajak dalam membayar pajak BPHTB dapat membawa pengaruh terhadap hasil dan proses pemungutan BPHTB oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri

#### 2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pendapatan

Keterbatasan SDM yang dimiliki oleh sebagian aparat dari Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri, membuat pihak Dinas Pendapatan untuk membuat mekanisme ataupun inovasi yang dapat memotivasi para pegawai atau staff Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri untuk meningkatkan kinerja personal maupun organisasinya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran atau rekomendasi yang berkaitan dengan efektivitas pemungutan BPHTB dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri :

1. Pemerintah Daerah sebaiknya mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri melalui Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri kepada Wajib Pajak tentang pemungutan pajak BPHTB di wilayah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah mengeluarkan sanksi dan mengeluarkan surat peringatan kepada wajib pajak yang tidak mau menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri sebaiknya lebih bersikap tegas kepada Wajib Pajak (WP) yang masih berbuat kecurangan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.